RENJA PERUBAHAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO
TAHUN 2019

PEMERINTAH KOTA PALOPO
TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Alhamdulilla,segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2019 ini dapat dilaksanankan.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) ini disusun sebagai tolak ukur keberhasilan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2019, dan akan jadi pedoman bagi seluruh aparat Dinas Perhubungan Kota Palopo dalam melaksanakan tugasnya di bidang Perhubungan untuk Tahun 2019

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penyusunana Rencana Kerja Perubahan ini untuk itu kami mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2019 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Dinas PerhubunganKota Palopo.

Wassalamu'alaikum wr,wb.

Palopo, 2019

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Andi Farid Baso Rachim,AP

Pangkat :Pembina TK.I / IV.b

NIP. 19760419 199412 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI

BAB. I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2 .Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1.4. Sistimatika Penulisan 3

BAB. II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD 4

2.2. Anggaran dan Realisasi Belanja OPD 10

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 12

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 12

2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 13

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran 12

3.2. Program dan Kegiatan..... 12

BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 13

1) Program Pengendalian dan Pengamanan lalulintas 16

2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ 16

3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 16

4) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 16

BAB. V PENUTUP18

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2019.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2019. Ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Dinas Perhubungan Kota Palopo pada Tahun 2019 menyusun Rencana Kerja yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan untuk memberikan landasan dan pedoman sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2019. Dokumen ini akan bermanfaat bagi Dinas Perhubungan Kota Palopo dan lembaga terkait dalam rangka mewujudkan keterpaduan pelaksanaan maupun pembiayaan program untuk Tahun 2019.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka Dinas Perhubungan Kota Palopo melakukan penyusunan Renja SKPD Tahun 2019 dengan mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota PalopoTahun2019 - 2023dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun2019 -2023 Kota Palopo. Digunakannya sasaran dan formula indikator Renstra atau RPJMD Tahun2019 - 2023 sebagai acuan dalam penyusunan Renja SKPD didasarkan oleh alasan sebagai berikut:

1. Tugas dan fungsi pokok Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Tahun 2019 tidak mengalami perubahan.
2. Penyusunan indikator dalam Rencana Kerja Tahun 2019 masih berpedoman kepada Permendagri 54 tahun 2010, Permenpan 20 tahun 2007, dan indikator SPM yang

dikeluarkan oleh kementerian teknis masing-masing SKPD.

3. Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai bentuk komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Palopo.

Dalam dokumen Renja SKPD, Dinas Perhubungan Kota Palopo maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Setiap program dan kegiatan dalam Renja SKPD Tahun 2019 yang menyajikan nilai pagu indikatif dan indikator capaian telah melalui proses verifikasi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan dianalisis dengan strategi prioritas serta kemampuan kinerja daerah secara menyeluruh.

1.2.Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan pada Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, pemerintahan daerah Propinsi, dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan

rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

10. Peraturan daerah kota palopo no.08 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah kota palopo.
11. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo Tahun 2005 -2025;
12. Peraturan Walikota Palopo Nomor tentang Rencana Kerja Prangkat Daerah Kota Palopo Tahun 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019 adalah menyediakan arah acuan bagi Dinas Perhubungan Kota Palopo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi. Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan sebagai dokumen perencanan adalah agar terdapat sinerginitas dan kontinyuitas dalam perencanaan program dan kegiatan di Kota Palopo

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2019 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD
2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD
2.3 Isu-isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4 Review Terhadap Rancangan Awa RKPD
2.5 Penelaan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan
3.2 Sasaran

BAB.IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1) Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas
2) Prog.Rehabilitasi dan Pemelihran Prasarana dan Fasilitas LLAJ
3) Perogram Peningkatan Pelayanan Angkutan
4) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
5) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
6) Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra OPD

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh OPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Strategis Perhubungan Tahun 2020 - 2023 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima)tahun, dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan bagi OPD. Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kota Palopo sesuai dengan Rencana Strategis tersebut, pada dasarnya akan bermuara pada pencapaian indikator keberhasilan suatu program dan kegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan secara menyeluruh yang dikaitkan dengan indikator tersebut.

Capaian kinerja pembangunan Dinas Perhubungan Kota Palopo pada tahun 2019 dapat dilihat dengan membandingkan capaian Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Palopo tahun 2018 yang telah ditetapkan dengan target yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Palopo tahun 2020- 2023.

Dinas Perhubungan Kota Palopo menangani satu urusan yang menjadi tugas pokok yaitu urusan perhubungan Kota Palopo.

Jenis pelayanan dasar Dinas perhubungan meliputi :

a. jaringan pelayanan angkutanjalan,
b. jaringan prasarana angkutanjalan,
c. fasilitas perlengkapanjalan,
d. pelayanan pengujian kendaraan bermotor,
e. penyediaan sumber daya manusia di terminal
f. pengujian kendaraan bermotor,
g. keselamatan.

Seperti yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Palopo, Dinas Perhubungan Kota Palopo mempunyai fungsi:

1) Perumusan kebijakan teknis di Dinas perhubungan, Kota Palopo;
2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Dinas perhubungan, Kota Palopo;

3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Dinas perhubungan, Kota Palopo;
4) Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas;
5) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga pemerintah/swasta yang berkaitan dengan lingkup tugas di Dinas perhubungan, Kota Palopo;
6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Dalam proses pengukuran kinerja, yang perlu diperhatikan adalah membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Palopo dengan realisasinya. Berdasarkan hasil pengukurannya, Tingkat Capaian Kinerja DinasPerhubungan Kota Palopo tahun 2018 disajikan padatabel berikut dibawahini:

1.Arus Penumpang Angkutan Umum

Indikator ini menggambarkan kinerja operasional layanan angkutan umum yang ada di Kota Palopo. Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2003 Tentang Penyelengaraan Angkutan Umum,Jumlah penumpang yang dimaksud merupakan jumlah penumpang yang terangkut oleh satu angkutan umum dalam satu hari (satuan dari jumlah penumpang adalah penumpang/angkutan/hari).

Indikator ini merupakan asalah satu dari beberapa parameter evaluasi kinerja sektor perhubungan.Semakin banyak jumlah arus penumpang yang terangkut, semakin mudahnya aksesibiltas sebuah wilayah.

Indikator ini mengurai besaran jumlah arus penumpang angkutan umum untuk masing-masing moda transportasi bis, kereta api, kapal laut, dan pesawat udara yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun dibagi dengan total Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah.

Tabel 2.1
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum
Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah arus keluar masuk penumpang angkutan umum dengan bis (Orang)	1.609.038	1.688.848	1.680.024	1.344.991	1.326.741
Jumlah arus keluar masuk penumpang angkutan umum dengan kapal laut (Orang)	2.057	769	122	445	314
Jumlah total arus penumpang angkutan umum (Orang)	**1.611.095**	**1.689.617**	**1.680.146**	**1.345.436**	**1.327.055**

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2018

Data ini menunjukan bahwa sepanjang tahun 2014-2018, jumlah penumpang yang keluar masuk di Kota Palopo menurun.Jika tahun 2018, ada sebanyak 1.327.055 juta orang, penumpang angkutan umum.Salah satu faktor yang patut diduga menjadi penyebab penurunan ini, adalah cukup banyak masyarakat yang beralih menggunakan transportasi udara.

2. Rasio Ijin Trayek

Ijin trayek adalah adalah ijin untuk mengangkut orang dan barang dengan kendaraan angkutan umum (bis atau mobil penumpang) pada jaringan trayek. Satu trayek biasanya dilayani puluhan armada angkutan umum.Trayek sendiri adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang/barang dengan mobil yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.

Indikator ini memberikan gambaran cakupan pelayanan trayek angkutan umum dalam memenuhi kebutuhan penduduk Kota Palopo.Apakah jumlah trayek yang sudah ditetapkan Pemerintah Kota Palopo sudah mampu melayani seluruh penduduk dalam mengakses wilayah di Kota Palopo menggunakan angkutan umum.Semakin tinggi nilai rasio indikator ini, semakin banyak masyarakat yang terlayani angkutan umum dan semakin mudah mengakses wilayah di Kota Palopo dengan angkutan umum.

Tabel .2.2
Rasio Ijin Trayek
Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan	Buah	3	3	3	3	4
b.	Jumlah penduduk	Jiwa	164.903	168.894	172.916	176.907	202.483
C	**Rasio**	**Per 100.000**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2018

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2018, dalam mengakses wilayah di Kota Palopo, hanya tersedia 2 trayek angkutan umum bagi 100.000 penduduk Kota Palopo. Dari perspektif layanan angkutan umum, masyarakat akan semakin kesulitan mengakses beberapa spot wilayah di Kota Palopo jika ingin menggunakan angkutan umum massal. Sebab jumlah penduduk akan cenderung terus bertambah. Meski demikian saat ini, Kota Palopo memiliki alternative transportasi umum lainnya misalnya taksi, dan layanan transportasi daring/internet sepeda motor.

3. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Jumlah Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.Indikator ini menggambarkan partisipasi para pelaku usaha angkutan umum memenuhi standar kelayakan angkutan umum dari aspek keamanan dan kenyaman serta kelaikan operasional kendaraan nya.Semakin tinggi angka indikator ini, maka semakin banyak angkutan umum yang laik dan aman untuk diakses oleh publik.

Tabel .2.3
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum
Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah uji KIR angkutan umum (Unit)	1.307	1.354	1.301	1.152	3.362

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2018

4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Indikator ini menggambarkan jumlah sentra pelayanan transportasi dan perhubungan masyarakat atau publik yang ada di Kota Palopo.Semakin beragam jumlah sentra atau pusat pelayanan transportasi publik, maka semakin tinggi aksesibilitas sebuah wilayah dijangkau oleh masyarakat.

Tabel 2.4
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

Uraian	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah pelabuhan laut	Unit	1	1	1	1	1
Jumlah terminal bis	Unit	1	1	1	1	1

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2018

5. Persentase Layanan Angkutan Darat

Indikator yang menunjukan seberapa besar kemampuan layanan angkutan tranportasi darat yang tersedia untuk memenuhi atau mencover kebutuhan transportasi darat atau penumpang yang ada.Semakin tinggi angka indikator ini, semakin tinggi kemampuan layanan angkutan darat di Kota Palopo.

Tabel 2.5
Persentase Layanan Angkutan Darat
Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah angkutan darat	Unit	1.467	1.524	1.441	1.332	3.223
b.	Jumlah penumpang angkutan darat	Orang	1.609.038	1.688.848	1.680.024	1.344.991	1.936.728
Persentase		**%**	**0.091%**	**0.090%**	**0.085%**	**0.099%**	**0.166 %**
Per 10.000 Penumpang			**9,1**	**9,02**	**8.5**	**,,9**	**16,6**

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2018

Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2018, untuk melayani 10.000 penumpang angkutan darat di Kota Palopo.Kondisi menunjukan dimana untuk 10.000 penumpang angkutan darat hanya tersedia 3 unit angkutan darat.

Artinya pada tahun 2018, 1 unit angkutan darat hanya melayani kurang lebih 3.333 orang penumpang per tahunnya.

6. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Indikator yang menggambarkan seberapa besar kedisplinan para pelaku usaha angkutan umum memenuhi standar kelayakan angkutan umum dari aspek keamanan dan kenyaman serta kelaikan operasional kendaraan nya.Semakin tinggi angka indikator ini, maka semakin banyak angkutan umum yang laik dan aman untuk diakses oleh publik.

Tabel 2.6
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum
Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada tahun n	Unit	160	170	140	180	486
b.	Jumlah angkutan umum pada tahun n	Unit	1.468	1.524	1.441	1.332	3.223
Persentase		**%**	**10,89**	**11,15**	**9,71**	**13,51**	**15.07**

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 dari 100 angkutan umum yang beroperasi di Kota Palopo hanya 3 kendaraan yang tidak memiliki KIR, artinya ada sebanyak 87 kendaraan yang sudah memiliki KIR.. Artinya kepemilikan KIR yang mengindikasikan kelayakan dan keamanan angkutan umum semakin baik. Sehingga ke depan angka persentase yang menjadi target indikator ini harus semakin naik.

7. Pemasangan Rambu – Rambu

Indikator ini menggambarkan tingkat pengamanan jalan raya bagi pengguna jalan yang tersedia melalui pemasangan rambu-rambu lalu lintas.Semakin panjang jalan yang menggunakan rambu, maka semakin besar tingkat pengamanan jalan raya yang tersedia.

Tabel 2.7
Persentase Pemasangan Rambu - Rambu
Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	Jumlah pemasangan rambu – rambu pada tahun n	Buah	136	142	144	158	179
b.	Jumlah rambu – rambu yang seharusnya tersedia	Buah	165	205	220	250	254
Persentase		**%**	**82,42**	**65,27**	**65,45**	**63,20**	**70,47**

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2018, pemenuhan kebutuhan rambu lalu lintas hanya 70,47%, kondisi ini masih jauh dari harapan yaitu 254 buah.. Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa tingkat pengamanan jalan raya bagi pengguna jalan di Kota Palopo sesuai yang diharapkan

8. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Indikator ini menggambarkan tingkat kepadatanjalan oleh kendaraan per km jalan.Semakin tinggi angka indikator ini, semakin padat kondisi jalan raya yang ada di Kota Palopo.

Tabel 2.8

Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
a.	Panjang jalan	Km	395.860	502	502	503.16	503.16
b.	Jumlah kendaraan	Unit	24.643	25.743	26.846	27.998	42.880
Rasio		**Angka**	**0.016**	**0.020**	**0.019**	**0.018**	**0.011**
Rasio		**Per 1000**	**16**	**20**	**19**	**18**	**11**

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2018

Data diatas menunjukan bahwa pada tahun 2018, tingkat kepadatan jalan per Km terdapat 11 kendaraan, Artinya kondisi jalan di Kota Palopo pada tahun 2018 masih normal atau mengalami kepadatan.

9. Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Indikator ini menggambarkan kinerja operasional layanan angkutan umum yang ada di Kota Palopo. Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2003 Tentang Penyelengaraan Angkutan Umum,Jumlah penumpang yang dimaksud merupakan jumlah penumpang yang terangkut oleh satu angkutan umum dalam satu hari (satuan dari jumlah penumpang adalah penumpang/angkutan/hari). Indikator ini merupakan asalah satu dari beberapa parameter evaluasi kinerja sektor perhubungan.Semakin banyak jumlah arus penumpang atau barang yang terangkut, menunjukan semakin mudahnya aksesibiltas sebuah wilayah baik oleh penumpang maupun lalu lintas barang.

Tabel 2.9
Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum
Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	1.609.038	1.688.848	1.680.024	1.344.991	1.326.741
Jumlah barang yang terangkut angkutan umum (m3)	575.995	601.337	605.649	600.911	603.524

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2018

10. Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun

Indikator ini menggambarkan besaran pemanfaatan sentra pelayanan transportasi dan perhubungan masyarakat atau publik yang ada di Kota Palopo.Semakin tinggi angka indikator ini, menunjukan semakin banyaknya orang dan lalu lintas barang yang keluar dan masuk ke Kota Palopo dalam satu tahun. Ini menunjukan semakin terbukanya sebuah daerah dan meningkatnya aksesibilitas wilayah terhadap daerah lain.

Tabel 2.10
Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun
Kota Palopo Tahun 2014 - 2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah barang melalui dermaga per tahun (m^3)	575.995	601.337	605.649	600.911	603.524
Jumlah orang melalui dermaga per tahun (orang)	2.057	769	122	445	314
Jumlah barang melalui terminal per tahun (kg)	3.218	3.733	3.360	2.689	3.176
Jumlah orang melalui terminal per tahun (orang)	1.609.038	1.688.848	1.680.024	1.344.991	1.326.741

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2018

2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja OPD

Berdasarkan hasil laporan keuangan Semester I pada Dinas Perhubungan Kota Palopo,dalam pelaksanaan Rencana Kerja 2018, belanja OPD di Kelompokkan dalam Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukkan Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang tediri dari Belanja Langsung Urusan OPD dan Belanja Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang Lingkup kegiatan sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai Tahun 2019 sebesar Rp. 5.466.106.000,-terealisasi sebesar Rp.2.513.184.215,- atau 45,98 % terdiri dari :

1. Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 3.253.924.000,-
2. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Sebesar Rp. 1.082.716.000,-
3. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Sebesar Rp. 46.750.000,-

b. Belanja Langsung :

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN 2019		
		ALOKASI (Rp)	SEMESTER I(Rp)	%
1	2	3	4	5
1.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**540.394.000**	**280.901.319**	**51,98**
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.096.000	17.511.500	69,78
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sunber Daya air dan Listrik	63.540.000	29.782.939	46,87
	c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas / operasional	16.250.000	5.060.840	13,14
	d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	85.628.000	35.005.000	40,88
	e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	45.700.000	19.558.800	42,80
	f.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	5.000.000	2.710.500	54,21
	g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	5.280.000	2.250.000	42,61
	h. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	155.700.000	116.023.740	74,52
	i. Penyediaan Jasa Administrasi Umum	138.200.000	52.998.000	38,35
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**366.450.000**	**213.833.273**	**58,35**
	a. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	150.000.000	150.000.000	100
	b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	35.500.000	7.250.000	20,42
	c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	37.600.000	12.000.000	31,91
	d. Pengadaan Mebeleur	28.750.000		
	e. Pemeliharaan rutin /berkala Gedung Kantor	19.000.000	9.429.000	49,63
	f. Pemeliharaan rutin /berkala Mobil Jabatan	25.000.000	10.360.575	41,44
	g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas Operasional	59.600.000	16.769.698	28,14
	h.Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung kantor	1.400.000	1.124.000	80,29
	i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	9.600.000	6.900.000	71,88
3.	**Progaram Peningkatan Sumber Daya Aparatur.**	**82.350.000**	**15.024.000**	**18,24**

	Pendidikan dan Pelaihan Formal	82.350.000	15.024.000	18,24
4.	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**1.800.000**		
	a, Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar realisasi kinerja SKPD	600.000		
	b, Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	600.000		
	C, Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	600.000		
5.	**Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ**	**37.135.000**	**7.896.000**	**21.26**
	-Pemeliharaan traffic Light	19.135.000	3.948.000	20,63
	-Pemeliharaan rambu-rambu lalulintas	18.000.000	3.948.000	21,94
6	**Program Peningkatan Pelayanan Angkutan**	**1.465.472.000**	**551.718.000**	**37,65**
	a. Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transpotasi Guna Keselamatan Penumpang	93.500.000	12.500.000	13,37
	b. Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	904.720.000	363.715.000	40,20
	c. Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan penumpang di Lingkungan Terminal	327.300.000	123.200.000	3,76
	d. Kegiatan Penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan lingkungan terminal	15.152.000	5.312.000	35,06
	e. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	70.800.000	25.602.000	36,16
	f. Pelaksanaan Kelayakan Moda Transportasi Angkutan Laut	54.000.000	21.389.000	3,96
7.	**Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas**	**49.999.000**		
	-Pengadaan Rambu-Rambu Lalulintas	49.999.000		
	Jumlah	**2.543.600.000**	**1.069.372.592**	

2.3.Isu-Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi OPD

Pelaksanaan pembangunan dewasa ini disatu sisi berdampak positif dan negatif bagi perkembangan kehidupan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, perlu memperhatikan isu yang berkembang di tengah masyarakat dewasa ini.Isu yang berkembang ini dapat dijadikan pijakan dalam menentukan arah kebijakan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Berikut ini rumusan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan:

1) Angka dan tingkat fatalitas kecelakaan relatif cukup tinggi yang tersebar pada *blackspot* di beberapa jalan utama Kota Palopo dengan salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan adalah kurangnya prasarana kelengkapan LLAJ;
2) Sarana transportasi yang laik jalan untuk menjamin terselenggaranya LLAJ yang selamat dannyaman;
3) Penyelenggaraan angkutan umum terkait dengan rehabilitasi prasarana LLAJ yaitu pemeliharaan fasilitas utama dan penunjang terminal orang dan/atau barang serta kemudahan dalam pelayanan perijinan angkutan;
4) Transportasi darat salah satu penyumbang terbesar dalam fenomena perusakan lingkungan yaitu dari sisi kualitas udara yang semakin buruk sehingga perlu diperketat dalam pengontrolan emisi gas

buang kendaraan bermotor secara berkala sebagai wujud kontribusi transportasi darat dalam pelestarian lingkungan hidup;Ketersediaan infrastruktur jaringan internal pemerintah daerah dan akses publik sampai ke tingkat kecamatan dan desa untuk terwujudnya e-government di Kota Palopo;

5) Keterbukaan informasi publik yang diukur dari penyampaian/publikasi mengenai kebijakan dan pembangunan pemerintahan daerah melalui website Kota Palopo penyajian yang cepat, akurat dan informatif, sertainovatif;
6) Perkembangan teknologi Kota Palopo yang sangat pesat dituntut adanya suatu kegiatan dalam rangka pembinaan, pengembangan, pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi aktif terhadap akses Kota Palopo dan dalam pameran pembangunan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Rancangan Awal RKPD yang telah disusun oleh BAPPEDA Kota Palopo telah mengakomodir semua program dan kegiatan yang menjadi rencana kerja Dinas Perhubungan Kota Palopo.Keselarasan program dan kegiatan hal ini nampak baik dalam jumlah maupun indikator yang terdapat dalam Rancangan Awal RKPD dibandingkan dengan Rencana Kerja SKPD Dinas Perhubungan Kota Palopo.

Proses penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2019 didasarkan kepada Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2019 -2023 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2019, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

2.5. Penelahaan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam konteks penyusunan rencana kerja SKPD, Dinas Perhubungan Kota Palopo dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan, memicu keikut sertaan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, SKPD dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dalam kegiatan pembangunan Dinas Perhbungan, Kota Palopo diperlukan juga memperhatikan aspirasi masyarakat,menggali dan memanfaatkan potensi yang ada yang tentunya akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan arah kebijakan yang akan diambil, memecahkan berbagai permasalahan, memicu keikut sertaan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, SKPD dituntut untuk siap dan sanggup

membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Kota Palopo

Tahun 2019

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ volume
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengendalian dan Pengamanan lalu Lintas	Kota Palopo		
	1. Peengadaan Traffic Light	Jl.Gutu Patalo dan Sungai Rongkong	Terciptanya Keamanan dan Kenyamanaan Berlalu Lintas	2 paket
	2. Pengadaan Warning Light	Songka dan MAN		2 pakek
	3. Pengadaan Papan nama jalan	Kota Palopo		
	4. Pengadaan Pagar Pengaman	Jl.Sungai Rongkong		150. Mtr
2	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		Terciptanya kelancaran dan keselamatan lalu lintas	
	1. Pengaturan Arus lalu lintas pada jam datang pulang sekolah			

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN

"MENCIPTAKAN SISTEM TRANSPORTASI, YANG HANDAL DAN BERBUDAYA" merupakan Visi Dinas Perhubungan Kota Palopo sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019 -2023 yang memiliki misi sebagai berikut:

Mewujudkan transportasi yang selamat, aman, tertib, terpadu, lancar, ramah lingkungan, nyaman dan terjangkau"

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Tujuan Dinas Perhubungan Kota Palopo, ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

a. Tujuan :

a. Meningkatkan mutu pelayanan transportasi daerah untuk menjamin terlaksananya lalu lintas orang dan barang
b. Meningkatkan tersedianya sarana Taransportasi di Kota Palopo

b. Sasaran:

Sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan dan pemeliharaan alat kelengkapan dan keselamatan lalu lintas
2. Peningkatan Keamanan dan kenyamanan pengguna prasarana LLAJ, yaitu terminal
3. Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan angkutan penumpang umum dan kelancaran lalulintas
4. Peningkatan pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor untuk mendukung tersedianya sarana transportasi yang laik jalan dan ramah lingkungan
5. Peningkatan ketersediaan sarana prasarana Kota Palopo, pemberdayaan kelompok informasi masyarakat.

Untuk Rencana Kerja Kerja Tahun 2019 ini kami belum dapat melakukan evaluasi Progres pencapaian tujuan dan sasaran dikarenakan realisasi pencapaian kinerja pada tahun rencana pertama masih sedang berlangsung, selaian itu kami pun tidak melakukan penyesuaian target dikarenakan belum adanya perubahan kebijakan pengawasan ditingkat nasional

Namun demikian target pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Palopo tahun 2019 kami rasa masih sesuai dengan kondisi nyata dan realita kebutuhan Tujuan dan sasaran Tahun 2019

Namun demikian target pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Palopo tahun 2019 kami rasa masih sesuai dengan kondisi nyata dan realita kebutuhan. Berikut tabel Tujuan dan Sasaran tahun 2019

3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN.

Program dan Kegiatan Perubahan Anggaran Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun Anggran 2019 sebagai berikut : (Lampiran Renja 2019)

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALOPO TA.2019

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				Betambah/ Berkurang	
		RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah		
		Volume	Satuan	Harga Satuan	RP	Volume	Satuan	Harga Satuan	RP	Rupiah	%
	BELANJA PEGAWAI				**5,466,106,000.00**				**5,466,106,000.00**		
	BELANJA LANGSUNG				**8,009,706,000.00**				**2,743,330,000.00**		
1.	***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran***				***540,394,000.00***	1.00	tahun	***654,074,000.00***	***654,074,000.00***	***113,680,000.00***	
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.00	tahun	25,096,000.00	25,096,000.00	1.00	tahun	35,096,000.00	35,096,000.00		
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.00	tahun	635,640,000.00	63,540,000.00	1.00	tahun	66,020,000.00	66,020,000.00		
c	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	1.00	tahun	16,250,000.00	16,250,000.00	1.00	tahun	47,750,000.00	47,750,000.00		
d	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1.00	tahun	85,628,000.00	85,628,000.00	1.00	tahun	90,628,000.00	90,628,000.00		
e	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.00	tahun	45,700,000.00	45,700,000.00	1.00	tahun	46,200,000.00	46,200,000.00		
f	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1.00	tahun	5,000,000.00	5,000,000.00	1.00	tahun	5,000,000.00	5,000,000.00		
g	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.00	tahun	5,280,000.00	5,280,000.00	1.00	tahun	5,280,000.00	5,280,000.00		
h	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1.00	tahun	155,700,000.00	155,700,000.00	1.00	tahun	215,700,000.00	215,700,000.00		
i	Penyediaan Jasa Administrasi Umum	1.00	tahun	138,200,000.00	138,200,000.00	1.00	tahun	142,400,000.00	142,400,000.00		
2	***Program Peningkatan sarana dan Prasarana Apaur***				***366,450,000.00***				***446,500,000.00***	***80,050,000.00***	
a	**Pengadaan Kendaraan Dinas Operasonal**	2.00	unit	75,000,000.00	**150,000,000.00**	1.00	unit	150,000,000.00	**150,000,000.00**		
b	**Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor**		unit	35,500,000.00	**35,500,000.00**				**37,000,000.00**		
	Pengadaan AC	2.00	unit	6,500,000.00	13,000,000.00	2.00	unit	7,250,000.00	14,500,000.00		
	Pengadaan Wereles	1.00	bh	3,500,000.00	3,500,000.00	1.00	bh	3,500,000.00	3,500,000.00		
	Pengadaan Lemari	2.00	bh	3,500,000.00	7,000,000.00	2.00	bh	3,500,000.00	7,000,000.00		
	Pengadaan Proyektor	1.00	unit	12,000,000.00	12,000,000.00	1.00	unit	12,000,000.00	12,000,000.00		

c	**Pengadaan Peralatan Gedung Kantor**	1.00	unit	5,582,600.00	**37,600,000.00**	1.00	unit		**48,350,000.00**		
	Pengadaan Lampu Rotary	2.00	unit	5,000,000.00	10,000,000.00	3.00	unit	3,300,000.00	9,900,000.00		
	Pengadaan Serine					1.00	unit	3,350,000.00	3,350,000.00		
	Pengadaan Lampu Stobo					4.00	bh	750,000.00	3,000,000.00		
	Pengadaan Tubular Motor BM					1.00	set	4,500,000.00	4,500,000.00		
	Pengadaan Komputer	2.00	unit	6,000,000.00	12,000,000.00	2.00	unit	6,000,000.00	12,000,000.00		
	Pengadaan Printer	6.00	unit	2,600,000.00	15,600,000.00	6.00	unit	2,600,000.00	15,600,000.00		
d	**Pengadaan Mebeleur**	1.00	unit	4,000,000.00	**28,750,000.00**			28,750,000.00	**28,750,000.00**		
	Pengadaan Meja 1 Biro	4.00	bh	2,500,000.00	10,000,000.00	4.00	bh	2,500,000.00	10,000,000.00		
	Pengadaan Meja 1/2 Biro	4.00	bh	1,187,000.00	4,750,000.00	4.00	bh	1,187,000.00	4,750,000.00		
	Pengadaan Kursi 1 Biro	2.00	bh	1,650,000.00	3,300,000.00	2.00	bh	1,650,000.00	3,300,000.00		
	Pengadaan Kursi 1 Biro	1.00	bh	1,700,000.00	1,700,000.00	1.00	bh	1,700,000.00	1,700,000.00		
	Pengadaan Kursi 1/2 Biro	9.00	bh	1,000,000.00	9,000,000.00	9.00	bh	1,000,000.00	9,000,000.00		
e	**Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor**	**1.00**	tahun	19,000,000.00	**19,000,000.00**	**1.00**	tahun	19,000,000.00	**19,000,000.00**		
f	**Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan**	**1.00**	tahun	25,000,000.00	**25,000,000.00**			25,000,000.00	**25,000,000.00**		
g	**Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional**	**1.00**	tahun	59,600,000.00	**59,600,000.00**			69,600,000.00	**69,600,000.00**		
h	**Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkpan Gedung Kantor**	**1.00**	tahun	1,400,000.00	**1,400,000.00**			2,800,000.00	**2,800,000.00**		
i	Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor	1	tahun	9,600,000.00	**9,600,000.00**			66,000,000.00	**66,000,000.00**		

	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				***82,350,000.00***				***82,350,000.00***	***0.00***	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal			82,350,000.00	82,350,000.00	1.00	tahun	82,350,000.00	82,350,000.00		
3	***Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan***				***1,800,000.00***				***1,800,000.00***	*0.00*	
a	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	1.00	keg	600,000.00	600,000.00	1.00	keg	600,000.00	600,000.00		
b	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran			600,000.00	600,000.00	1.00	keg	600,000.00	600,000.00		
c	Penyusunan Laporan Akhir Tahun			600,000.00	600,000.00	1.00	keg	600,000.00	600,000.00		
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ				***37,135,000.00***				***37,135,000.00***	***0.00***	
a	Pemeliharaan Traffic Light	12.00	Traffic	19,135,000.00	19,135,000.00	12.00	Traffic	19,135,000.00	19,135,000.00		
b	Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalulintas	250.00	rambu	18,000,000.00	18,000,000.00	250.00	rambu	18,000,000.00	18,000,000.00		
4	***Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan***				***1,465,472,000.00***				***1,471,472,000.00***	***6,000,000.00***	
a	Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	1.00	tahun	93,500,000.00	93,500,000.00	1.00	tahun	93,500,000.00	93,500,000.00		
c	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya	1.00		904,720,000.00	904,720,000.00	1.00	tahun	904,720,000.00	904,720,000.00		
d	Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan di Terminal	1.00		327,300,000.00	327,300,000.00	1.00	tahun	327,300,000.00	327,300,000.00		
e	Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan Terminal	1.00		15,152,000.00	15,152,000.00	1.00	tahun	15,152,000.00	15,152,000.00		
f	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	1.00		70,800,000.00	70,800,000.00	1.00	tahun	76,800,000.00	76,800,000.00		
h	Pelaksanaan Kelayakan Moda Transportasi Angkutan Laut	1.00		54,000,000.00	54,000,000.00	1.00	tahun	54,000,000.00	54,000,000.00		
5	***Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas***			-	***49,999,000.00***				***49,999,000.00***		
	Pengadaan rambu-rambu Lalu Lintas	*75.00*	rambu		49,999,000.00	75.00	rambu		49,999,000.00		
	Jumlah				**8,009,706,000.00**				**8,209,436,000.00**	**199,730,000.00**	

Palopo,15 Juli 2019
Kepala Dinas Perhubungan

Andi Farid Baso Rachim,.
Nip.19760419 199412 1 001

BAB.IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAN

Rencana Kerja Tahun 2019 merupakan penjabaran atas Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2019 – 2023, yang dapat diuraikan sebagai berikut :***Sasaran 1. Peningkatan ketersediaan dan pemeliharaan alat kelengkapan dan keselamatan lalu lintas.***

Sasaran tersebut dicapai dengan 2 program dan 5 Kegiatan. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

1) Program Pengendalian dan Pengamanan LaluLintas

a. Pengadaan rambu-rambu lalulintas
b. Pengadaan Traffic Light
c. Pengadaan Halte Bus
d. Pengadaan Worning light
e. Papan Nama Jalan

2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan FasilitasLLAJ

a. Pemeliharaan Traffic Light
b. Pemeliharaan Rambu-Rambu lalu lintas

Sasaran 2. Peningkatan Keamanan dan kenyamanan pengguna prasarana LLAJ, yaitu terminal baik terminal orang ,Pengujian Kendaraan Bermotor,dan Pembangunan Sarana dan Fasilitas.

Sasaran tersebut dicapai dengan program 2 dan 7 Kegiatan. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

3) Program PeningkatanPelayananAngkutan

a. Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan
b. Kegiatan Uji Kelayaakan Sarana Transportasi Guna Kesematan Penumpan
c. Kegiatan Pengendalian disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
d. Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal
e. Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan dilingkungan terminal
f. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan
g. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
h. Pelayanan Kelayakan Moda Transportasi Angkutan Laut

4) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

a. Pembangunan Gedung Terminal

Sasaran 3.Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan ketersediaan dan keterjangkauan angkutan penumpang umum dan kelancaran lalu lintas.Hal ini dilakukan dengan evaluasi kinerja angkutan umum.

Sasaran tersebut dicapai dengan 1 program dan 2 Kegiatan. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

Selain itu ada sejumlah program dan 20 kegiatan penunjang, dengan penjabaran sebagai berikut:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
   a. Penyediaan jasa surat-menyurat
   b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
   c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
   d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
   e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
   f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
   g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
   h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
   i. Penyediaan Jasa Administrasi umum

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   a. Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
   b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
   c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
   d. Pengadaan mebeleur
   e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
   f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil jabatan
   g. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
   h. Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
   i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
   a. Pendidikan dan pelatihan formal

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
   a. Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD
   b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
   c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Palopo Tahun 2019 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Tahun 2019, sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota PalopoTahun 2019, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo.

Rencana Kerja tahunan memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi, dan tujuan, dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku.

Akhirnya, Rencana ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PALOPO

ANDI FARID BASO RACHIM, AP
Pangkat : Pembina TK.I / IV.b
NIP.19760419 199412 1 001